



Masa Kejayaan dan Kemunduran Dinasti Mughal di India

Inayah, Syamsul Kurniawan

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia dan IAIN Pontianak, Indonesia

inayah.pjjpai@gmail.com, syamsulkurniawan1983@gmail.com

INFO ARTIKEL

Kata Kunci: Dinasti Mughal, Islam, Ibnu Khaldun, Asabiyyah, Siklus Peradaban, Kejayaan, Kemunduran

ABSTRAK

Dinasti Mughal adalah salah satu dinasti besar dalam sejarah India yang mendominasi wilayah Asia Selatan pada abad ke-16 hingga ke-18. Pada masa kejayaannya, Dinasti Mughal tidak hanya memperluas wilayah kekuasaan, tetapi juga mengembangkan kebudayaan, seni, dan arsitektur. Melalui kekuatan politik, stabilitas ekonomi, dan kemajuan budaya, dinasti Mughal berhasil memperkaya peradaban Islam, khususnya dalam seni dan arsitektur. Namun, faktor-faktor seperti perpecahan internal, tekanan kolonial, dan kebijakan agama yang berubah-ubah turut memicu kemundurannya. Artikel ini menganalisis dinamika kejayaan dan kemunduran Dinasti Mughal di India menggunakan teori siklus peradaban Ibnu Khaldun. Teori ini menjelaskan pola perkembangan peradaban melalui fase kelahiran, kejayaan, dan kemunduran yang dipengaruhi oleh dinamika politik, ekonomi, dan sosial. Dinasti Mughal mencerminkan pola khas peradaban: kelahiran, kejayaan, stagnasi, dan kehancuran, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah. Penelitian ini memanfaatkan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka berdasarkan sumber-sumber primer dan sekunder terkait sejarah Dinasti Mughal. Temuan menunjukkan bahwa asabiyyah (solidaritas kelompok) menjadi landasan awal kesuksesan dinasti, sementara kemunduran dipicu oleh melemahnya asabiyyah, kebijakan ekonomi yang kurang efektif, konflik internal, serta tekanan eksternal, termasuk invasi kolonial Inggris. Dinasti Mughal mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Akbar hingga Aurangzeb, ditandai oleh stabilitas politik, kemajuan ekonomi, dan pencapaian budaya. Namun, kemunduran dinasti ini terjadi akibat lemahnya kepemimpinan, konflik internal, serta tekanan eksternal dari kolonialisme Eropa. Dengan menganalisis perjalanan Dinasti Mughal, artikel ini menegaskan relevansi teori siklus peradaban Ibnu Khaldun dalam menjelaskan dinamika sosial-politik peradaban besar. Kajian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman tentang bagaimana teori klasik dapat digunakan untuk menganalisis perubahan dalam peradaban besar di masa lalu.

Keywords: Mughal Dynasty, Islam, Ibn Khaldun, Asabiyyah, Civilization Cycle, Glory, Decline

ABSTRACT

The Mughal Dynasty was one of the great dynasties in Indian history that dominated South Asia from the 16th to the 18th century. During its heyday, the Mughal Dynasty not only expanded its territory, but also developed culture, art, and architecture. Through political power, economic stability, and cultural advancement. The Mughals succeeded in enriching Islamic

civilisation, especially in art and architecture. However, factors such as internal divisions, colonial pressure and changing religious policies contributed to its decline. This article analyses the dynamics of the Mughal Dynasty's rise and fall in India using Ibn Khaldun's civilisational cycle theory. This theory explains the pattern of civilisation development through phases of birth, triumph and decline influenced by political, economic and social dynamics. The Mughal dynasty reflects the typical pattern of civilisation: birth, glory, stagnation and destruction, as described by Ibn Khaldun in Muqaddimah. This research utilises a qualitative approach with a literature review method based on primary and secondary sources related to the history of the Mughal Dynasty. The findings show that asabiyyah (group solidarity) became the initial foundation of the dynasty's success, while the decline was triggered by the weakening of asabiyyah, ineffective economic policies, internal conflicts, and external pressures, including the British colonial invasion. The Mughal dynasty reached its peak during the reigns of Akbar to Aurangzeb, characterised by political stability, economic progress and cultural achievements. However, the dynasty's decline was due to weak leadership, internal conflicts, and external pressures from European colonialism. By analysing the journey of the Mughal Dynasty, this article asserts the relevance of Ibn Khaldun's civilisational cycle theory in explaining the socio-political dynamics of great civilisations. This study is expected to enrich the understanding of how classical theory can be used to analyse changes in past great civilisations.

PENDAHULUAN

India, yang sebelumnya mencakup wilayah India, Pakistan, dan Bangladesh, telah lama menjadi pusat perhatian. Ketiga negara tersebut berbagi sejarah yang sama sejak masa kolonialisme Barat. Pegunungan Himalaya, dengan panjang sekitar 2.500 km, membentang dari Afghanistan hingga Assam, membentuk benteng alami yang memisahkan India dari wilayah Hindu Kush di bagian barat laut (Su'ud, 1988: 10).

Geografi India membuatnya sulit menerima pengaruh luar. Namun, sejumlah bangsa tetap berhasil memasuki wilayah ini, membawa pengaruh pada kebudayaan lokal, terutama melalui Celah Khyber yang menghubungkan Afghanistan serta Lintasan Bolan di Pakistan. Irwan (2007) menyebutkan bahwa India menjadi tempat berkembangnya beberapa agama, seperti Hindu, Buddha, Jain, dan Sikh. Di samping itu, Islam yang mulai menyebar dari Jazirah Arab pada pertengahan abad ke-7 M turut memberikan dampak besar terhadap India.

Menurut Abdul Karim (2003: 12), Dinasti Islam berkembang di India dari awal abad ke-13 hingga pertengahan abad ke-18. Pengaruh politik Islam di kawasan ini berakar sejak awal abad ke-7, ketika Muhammad bin al-Qasim, atas perintah Khalifah al-Walid I, menyerbu Sind pada tahun 708 M. Supardi (2008: 40) menyebutkan bahwa meskipun Qasim belum berhasil menguasai seluruh India, ia sukses menanamkan pengaruh politik Islam di Punjab. Perkembangan ini berlanjut dengan munculnya Dinasti Ghazni, yang

sejak tahun 961 M berpusat di Afghanistan, menjadi kekuatan politik utama di India. Setelah runtuhnya Dinasti Ghuri, Kesultanan Delhi didirikan oleh Kutbu'ddin Aibak, menandai awal berdirinya kekuasaan Islam yang bertahan hingga tahun 1857.

Menelusuri kekuasaan dinasti-dinasti Islam di India membuka wawasan tentang warisan budaya yang luar biasa dan dinamika politik yang khas. Antara tahun 1206 hingga 1857 M, terdapat lima dinasti Islam utama yang memerintah di wilayah ini, yaitu Dinasti Mamluk atau Dinasti Budak (1206–1290), Dinasti Khilji (1290–1321), Dinasti Tughlaq (1321–1388), Dinasti Lodhi (1451–1526), dan Dinasti Mughal (1526–1857). Setiap dinasti membawa kontribusi unik, baik dalam seni, arsitektur, maupun administrasi. Dinasti Mughal, sebagai dinasti terakhir, meninggalkan pengaruh yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk tata pemerintahan, sistem hukum, seni, dan arsitektur, yang tercermin dalam karya-karya monumental seperti Taj Mahal dan Benteng Merah di Delhi.

Dinasti Mughal didirikan oleh Babur pada awal abad ke-16 setelah mengalahkan Sultan Ibrahim Lodi pada Pertempuran Panipat pertama. Kesultanan ini mengalami puncak kejayaan pada masa pemerintahan Akbar, Shah Jahan, dan Aurangzeb, yang menandai era pengembangan budaya, intelektual, dan arsitektur yang mengesankan. Pengaruhnya menyentuh hampir setiap aspek kehidupan di anak benua India. Dinasti Mughal tidak hanya membentuk kehidupan politik di India tetapi juga memperkaya peradaban Islam dengan berbagai kontribusi dalam seni, budaya, arsitektur, dan bidang keagamaan. Namun, setelah masa pemerintahan Aurangzeb, dinasti ini memasuki masa kemunduran yang lambat, yang berakhir dengan runtuhnya kerajaan tersebut pada awal abad ke-19.

Ibnu Khaldun, melalui teori siklus peradabannya, menjelaskan bahwa setiap peradaban melewati fase kelahiran (*asabiyyah* yang kuat), kejayaan (kemapanan sosial-ekonomi), stagnasi (kelemahan *asabiyyah*), dan kemunduran (kehancuran akibat faktor internal dan eksternal). Perspektif ini relevan dalam menganalisis Dinasti Mughal, yang mencapai kejayaan melalui kebijakan inklusif dan inovasi, tetapi kemudian runtuh karena disintegrasi internal dan tekanan eksternal. Artikel ini bertujuan untuk menguraikan perjalanan Dinasti Mughal berdasarkan teori Ibnu Khaldun, dengan menyoroti faktor-faktor yang berkontribusi pada kejayaan dan kemunduran dinasti tersebut. Kajian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman tentang bagaimana teori klasik dapat digunakan untuk menganalisis perubahan dalam peradaban besar di masa lalu.

METODE PENELITIAN

Penulisan artikel Masa Kejayaan dan Kemunduran Islam pada Masa Dinasti Mughal di India ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka berdasarkan sumber-sumber primer dan sekunder terkait sejarah Dinasti Mughal. Sumber data berasal dari literatur terkait Dinasti Mughal dan teori Ibnu Khaldun, termasuk buku, artikel jurnal, dan dokumen sejarah. Analisis dilakukan dengan mengintegrasikan konsep *asabiyyah* dan siklus peradaban ke dalam narasi sejarah Dinasti Mughal, mengidentifikasi pola kelahiran, kejayaan, stagnasi, dan kemunduran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fase Kelahiran: Sejarah Berdirinya Dinasti Mughal di India

Dinasti Islam pertama di India didirikan oleh Qutb al-Din Aibak (1206-1211), yang berhasil membangun kerajaan Islam yang mandiri di wilayah tersebut (TSG Mulia, 1952: 40). Pada 1206, setelah memperoleh kekuatan yang cukup, Aibak mendirikan Kesultanan Delhi, yang bertahan hingga 1290. Dinasti ini sering disebut sebagai dinasti para hamba, karena Aibak sendiri bukan berasal dari keluarga bangsawan. Sultan Balban menjadi penguasa terakhir dinasti ini. Setelah kematiannya tanpa meninggalkan penerus, kepemimpinan Kesultanan Delhi beralih ke Dinasti Khilji (1290-1321), yang kemudian diikuti oleh Dinasti Tughlaq (1321-1399), Dinasti Sayyid (1414-1451), dan Dinasti Lodi (1451-1526), sebelum akhirnya berlanjut ke Dinasti Mughal.

Dinasti Mughal merupakan salah satu kejayaan Islam yang tidak terlupakan. Pada masa lalu, bangsa Mughal dikenal sebagai penghancur besar peradaban Islam yang dibangun oleh Dinasti Abbasiyah di bawah pimpinan Hulagu Khan. Namun, generasi penerus mereka justru berubah menjadi penyebar Islam yang tangguh dan berpengaruh (Hamka, 1975:139).

Dinasti Mughal (1256-1858 M) merupakan kekuasaan Islam terbesar pada anak benua India. Dinasti ini didirikan oleh seorang keturunan Jengsi, salah satu dari cucu Timur Lenk yaitu bernama Zahirudin Babur (1526-1539). Sultan Babur adalah seorang keturunan bangsa Turki (pihak ayah) dan bangsa Padang Pasir Lodi/ Jengis Khan (pihak ibu). (Tuti, 1990: 37) Sebagai seorang keturunan Mongol, Babur memiliki sifat bawaan pemberani dan ahli dalam perang. Ia berpandangan bahwa India akan berhasil dibangun menjadi imperium yang kuat mengingat kekayaan yang dimilikinya.

Ibrahim Lodi, cucu Sultan Lodi dan sultan terakhir Delhi, mengambil tindakan tegas dengan memenjarakan para bangsawan yang menentanginya. Langkah ini memicu konflik besar yang berujung pada pertempuran di Panipat pada 21 April 1526 M antara Ibrahim Lodi dan Zahiruddin Babur, cucu Timur Lenk. Dalam pertempuran tersebut, Ibrahim Lodi bersama ribuan tentaranya tewas. Kemenangan ini mengantarkan Babur untuk menguasai Delhi dan mendirikan pemerintahan baru. Sejak saat itu, berdirilah Dinasti Mughal di India dengan menjadikan Delhi sebagai ibu kota (Zalukhu, 2024).

Sultan Babur memiliki ambisi besar untuk menaklukkan Samarkand, kota strategis di Asia Tengah pada masa itu. Dengan dukungan Raja Safawi, Ismail I, ia berhasil merebut Samarkand pada 1492 M. Pada 1504 M, Babur juga berhasil menguasai Kabul, ibu kota Afghanistan. Setelah menaklukkan Kabul, ia melanjutkan ekspansi ke India, yang saat itu berada di bawah pemerintahan Ibrahim Lodi, yang tengah mengalami krisis politik. Alam Khan, paman Ibrahim Lodi, bersama Daulat Khan, Gubernur Lahore, meminta bantuan Babur untuk menggulingkan Ibrahim Lodi. Permintaan tersebut disetujui Babur, dan pada 1525 M ia berhasil menguasai Punjab dengan ibu kotanya Lahore. Babur kemudian memimpin pasukannya menuju Delhi, yang berujung pada Pertempuran Panipat I pada 21 April 1526 M, pertempuran besar antara Babur dan Ibrahim Lodi. Dalam pertempuran ini, Ibrahim Lodi tewas, dan kekuasaannya jatuh ke

tangan Babur. Kemenangan tersebut menandai berdirinya Dinasti Mughal di India, dengan Delhi sebagai ibu kotanya (Lubis et al., 2021).

Di bawah Kerajaan Mughal inilah pemerintahan muslim di India akhirnya diperkokoh. Walaupun ada penaklukan baru di daerah Selatan, pusat kekuasaan Mughal tetap di Utara, karena mereka datang dari Asia Tengah ialah daerah seedaran pengaruh kebudayaan Turki-Iran. Jika pada dinasti-dinasti sebelumnya Islam belum menemukan kejayaannya, maka kerajaan ini justru bersinar dan berjaya. (Fitrah dkk, 2024) Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa faktor berdirinya Dinasti Mughal adalah: (1) Ambisi dan karakter Babur sebagai pewaris keperkasaan ras mongolia; (2) Sebagai jawaban atas krisis yang tengah melanda India.

Fase Kejayaan: Masa Kejayaan dan Kebijakan Dinasti Mughal Pada Masa Pemerintaha Akbar hingga Aurangzeb

Masa kejayaan Dinasti Mughal dimulai saat Akbar berkuasa (1556–1605 M) dan diteruskan oleh penerus-penerusnya, yaitu Jahangir (1605–1628 M), Shah Jahan (1628–1658 M), dan Aurangzeb (1658–1707 M). Akbar naik tahta pada usia 14 tahun menggantikan ayahnya, dan di awal pemerintahannya, banyak aspek kekuasaan yang didorong oleh Bairam Khan. Bairam Khan memainkan peran penting dalam menanggulangi pemberontakan, seperti yang dilakukan oleh keturunan Sher Khan Shah di Punjab dan pemberontakan Hilmi di Gwalior serta Agra. Berbagai peperangan besar, termasuk Pertempuran Panipat I (1556 M), dimenangkan oleh pasukan Mughal, yang semakin memperkokohkan posisi Akbar di wilayah India bagian utara (Zubaidah, 2016: 122).

Dinasti ini memberikan kontribusi yang penting dalam perkembangan peradaban Islam di India, khususnya melalui berbagai pencapaiannya. Dalam bidang militer, kekuatan pasukan Mughal diakui sangat tangguh. Akbar Khan menerapkan sistem pemerintahan dengan pendekatan militeristik, di mana raja memimpin pemerintahan pusat, kepala komandan (Sipah Salat) memimpin wilayah, dan komandan lokal (Faudjat) bertanggung jawab atas sub-wilayah. Selain itu, Akbar juga memperkenalkan konsep Din Ilahi serta mendirikan Mansabdari, yaitu institusi pelayanan publik yang bertugas menyediakan pasukan (Adam et al., 2022).

Pada awal pemerintahan Akbar (1556–1605), Kerajaan Mughal menghadapi berbagai kesulitan, termasuk krisis ekonomi yang menyebabkan kelaparan melanda masyarakat, sementara kekaisaran juga harus menghadapi ancaman eksternal (Mahmudunnasir, 1994: 351). Untuk mengatasi tantangan tersebut, Akbar mengambil langkah-langkah strategis untuk membangun fondasi yang kuat bagi keberlangsungan kekuasaannya, baik dari sisi institusional maupun geografis. Salah satu aspek penting dari pemerintahan Akbar adalah struktur politik yang berbentuk elit militer yang terdiri dari berbagai kelompok etnis dan sosial, termasuk pembesar-pembesar dari Afghanistan, Iran, Turki, serta Muslim India asli. Meskipun pemerintahan secara resmi dikuasai oleh Muslim, sekitar 29% dari aristokrasi Mughal berasal dari kalangan Hindu, banyak di antaranya berasal dari kelompok Rajput dan Maratha (Lapidus, 2003: 695).

Setelah Akbar, kemajuan Dinasti Mughal tetap berlanjut di bawah Jahangir dan Syah Jehan. Pada masa Syah Jehan, wilayah Mughal meluas hingga melampaui India, mencakup Kandahar, Balkh, Badakhshan, dan Samarkand. Syah Jehan juga memperkuat ekonomi melalui sistem irigasi dan perdagangan ekspor-impor. Namun, pada masa Aurangzeb (1658–1707 M), kebijakan yang kurang inklusif, seperti pemberlakuan pajak kepala bagi non-Muslim dan penghancuran patung Hindu, menyebabkan kebencian di kalangan warga Hindu. Hal ini menandai awal kemunduran Dinasti Mughal. (Lapidus, 2003: 695).

Pada masa pemerintahan Jahangir dan Syah Jehan, Kerajaan Mughal tetap terjaga stabilitasnya dan dikelola dengan baik, mirip dengan masa pemerintahan Akbar. Kemajuan yang dicapai hampir setara dengan periode sebelumnya. Bahkan, menurut Jahid Haji Sidek, terutama pada masa Syah Jehan, wilayah Kerajaan Mughal meluas melebihi batas India, mencakup daerah-daerah seperti Kandahar, Balkh, Badakan, dan Samarkand. Keberhasilannya terlihat jelas dari kemampuan dalam menata politik negara. Pembangunan ekonomi dimulai dengan pengembangan sistem irigasi, sementara perdagangan didorong dengan ekspor-impor produk-produk industri seperti tekstil, keramik, dan kerajinan tangan lainnya (Sidek, 1984: 245-246).

Masa pemerintahan Jahangir dan Syah Jehan dipandang sebagai periode kelanjutan stabilitas dan kemajuan ekonomi dalam sejarah Kerajaan Mughal. Di bawah pemerintahan mereka, wilayah kekuasaan Mughal mengalami ekspansi yang signifikan. Syah Jehan, khususnya, dikenal dengan prestasinya dalam memperluas kerajaan serta memajukan seni dan budaya, dengan pembangunan monumen megah seperti Taj Mahal. Dalam hal ekonomi, selain memperkenalkan inovasi-irigasi untuk pertanian, perdagangan internasional juga berkembang pesat. India menjadi pusat perdagangan utama di dunia, dengan produk seperti tekstil, rempah-rempah, dan kerajinan tangan yang diekspor ke berbagai negara.

Setelah masa pemerintahan Jahangir dan Syah Jehan, kekuasaan Kerajaan Mughal beralih ke tangan Aurangzeb (1658-1707 M). Meskipun kerajaan tetap mengalami kemajuan di berbagai sektor, sebagian besar kemajuan tersebut merupakan warisan dari pemerintahan sebelumnya (Thahir, 2004: 211-212). Salah satu kebijakan paling kontroversial yang diterapkan oleh Aurangzeb adalah pajak kepala yang dikenakan kepada warga non-Muslim dan perintah untuk menghancurkan patung-patung Hindu (Lapidus, 2003: 711). Kebijakan ini memicu kebencian di kalangan masyarakat Hindu terhadap Aurangzeb, yang akhirnya berkontribusi pada kemunduran Kerajaan Mughal, karena kehilangan dukungan dari sebagian besar rakyatnya.

Masa pemerintahan Aurangzeb dikenal dengan kebijakan yang lebih konservatif dan keagamaan yang lebih ketat dibandingkan dengan pendahulunya. Aurangzeb meneruskan kebijakan yang memperkuat identitas Islam dalam pemerintahan, tetapi kebijakannya yang keras terhadap agama lain, khususnya Hindu, memperburuk hubungan antara kerajaan dan masyarakat non-Muslim. Pajak kepala (jizyah) yang dikenakan pada non-Muslim dan penghancuran tempat-tempat ibadah Hindu, seperti yang dilakukan terhadap Kuil Keshava Deva di Mathura, berkontribusi pada kemerosotan stabilitas

politik yang sebelumnya terjaga. Namun, meskipun kemajuan di bidang seni dan arsitektur seperti pembangunan Masjid Badshahi di Lahore, kemajuan perdagangan dan keilmuan juga tercatat pada periode ini, meskipun dengan tantangan yang lebih besar dibandingkan masa sebelumnya.

Bidang Politik dan Administrasi

Pada masa pemerintahan Akbar, Kerajaan Mughal mencapai puncak kejayaannya berkat penerapan kebijakan politik Sulahul, yang berarti toleransi universal. Kebijakan ini menjadi kunci kesuksesan pemerintahannya, yang ditandai dengan perluasan wilayah kekuasaan hingga mencakup daerah-daerah seperti Chubdar, Ghond, Chitor, Kashmir, Bengal, Bihar, Gujarat, Orissa, Deccan, Gawilgarh, Narhala, Ahmadnagar, dan Asirgah. Keberhasilan tersebut terus berlanjut hingga masa pemerintahan Aurangzeb. Selama memimpin, Akbar menetapkan sejumlah kebijakan strategis, termasuk pengelolaan pemerintahan berbasis pendekatan militer di wilayah yang dikuasai. Dalam sistem ini, wilayah utama dikelola oleh seorang *sipah salar* atau kepala komandan, sedangkan sub-distrik dipimpin oleh *faudjar* atau komandan daerah. Selain itu, Akbar memperkuat fondasi institusional dan geografis untuk memperkuat kekuasaan kerajaannya, dengan melibatkan elit militer dan politik yang terdiri atas orang-orang dari berbagai latar belakang, seperti Iran, Turki, Afghanistan, serta Muslim lokal India (Thohir, 2004: 205).

Selain itu, ada banyak kebijakan lainnya yang lebih mengutamakan persatuan politik, meskipun sering kali mengorbankan nilai-nilai syariah Islam. Ini merupakan periode yang benar-benar "sinkretik" di India, yaitu suatu usaha untuk menciptakan "pemerintahan Islam" yang diterima oleh masyarakat India. Sultan Akbar berusaha melampaui batas-batas tradisi Hindu dan agama-agama lain di India. Ia meninggal pada tahun 1605 M setelah menderita penyakit serius, yang kemungkinan dipicu oleh rasa cemburu akibat pembunuhan sahabat-sahabat dekatnya oleh anaknya, Jahangir. Meskipun demikian, keberhasilan yang dicapainya dapat dipertahankan oleh penerus-penerusnya, seperti Jahangir (1605-1627 M), Syah Jehan (1628-1658 M), dan Aurangzeb.

Bidang Ekonomi dan Sosial

Dinasti Mughal memberikan kontribusi yang signifikan dalam bidang ekonomi, terutama melalui pengembangan sektor pertanian, dengan fokus pada komoditas seperti padi, kacang, tebu, rempah-rempah, tembakau, dan kapas. Selain pertanian, pemerintahannya juga mendorong kemajuan dalam sektor industri tenun, pertambangan, dan perdagangan. Di bidang sastra, karya-karya penyair istana menjadi aspek yang paling menonjol, baik dalam bahasa Persia maupun bahasa India (Yamani & Santalia, 2022).

Stabilitas politik yang berhasil diciptakan oleh Akbar menjadi landasan bagi kemajuan di berbagai bidang, termasuk ekonomi. Kerajaan Mughal mampu mengembangkan sektor pertanian, pertambangan, dan perdagangan, dengan fokus utama pada pertanian. Hubungan antara pemerintah dan petani diatur dengan baik melalui sistem *deh*, yaitu unit lahan pertanian kecil yang tergabung dalam *pargana* (desa). Komunitas petani ini dipimpin oleh seorang *mukadham*, yang berperan sebagai penghubung antara

petani dan pemerintah. Setiap petani diwajibkan menyetorkan hasil panennya, sementara pemerintah memberikan perlindungan kepada mereka dari berbagai ancaman kejahatan.

Selain itu, di masa pemerintahan Syah Jehan, inovasi ekonomi terus berlanjut, salah satunya melalui pengembangan sistem irigasi yang menopang produktivitas pertanian. Sistem perpajakan zabt juga memainkan peran penting dalam menstabilkan penerimaan negara, sekaligus mendorong perkembangan sektor perdagangan dan industri (Thahir, 2004: 205). Perencanaan yang terintegrasi ini mencerminkan kebijakan ekonomi progresif yang tidak hanya mendukung pembangunan infrastruktur pertanian tetapi juga memperkuat posisi Kerajaan Mughal dalam peta perdagangan global pada masa itu.

Keseluruhan kebijakan ini menunjukkan bahwa Akbar dan penerusnya tidak hanya fokus pada perluasan wilayah, tetapi juga membangun fondasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, menjadikan Kerajaan Mughal sebagai salah satu kekuatan ekonomi dan politik utama di dunia pada masa itu. (Thahir, 2004: 205).

Kebijakan sosial yang diterapkan oleh Akbar didasarkan pada prinsip *sulahul* (toleransi universal), yang menganggap semua rakyatnya setara tanpa memandang agama atau status sosial. Beberapa kebijakan yang diterapkan antara lain: (1) Penghapusan pajak *jizyah* bagi non-Muslim; (2) Pemberian akses pendidikan yang setara bagi seluruh masyarakat, dengan mendirikan madrasah; (3) Penyerahan tanah wakaf untuk lembaga-lembaga sufi; (4) Pembentukan undang-undang perkawinan baru yang melarang pernikahan dini, poligami, serta mendorong perkawinan antar agama; (5) Penghapusan pajak pertanian, terutama bagi petani miskin, tanpa memandang agama; (6) Pembubaran tradisi perbudakan yang berasal dari tawanan perang; dan (7) Pengaturan khitanan anak-anak (Thahir, 2004: 104).

Akbar juga memperkenalkan ajaran *Din Ilahiy*, yang memiliki beberapa karakteristik utama, antara lain: (a) keyakinan akan ke-Esaan Tuhan; (b) penetapan Akbar sebagai khalifah Tuhan dan *padash* (*al-Insan al-Kamil*), yang dianggap sebagai perwujudan Tuhan di dunia dan selalu mendapat petunjuk langsung dari-Nya, serta diyakini bebas dari kesalahan; (c) kewajiban bagi semua pemimpin agama untuk tunduk dan memberikan penghormatan kepada Akbar; (d) sebagai manusia *padash*, Akbar mengikuti pantangan untuk mengonsumsi daging (menjadi vegetarian); (e) penghormatan terhadap api dan matahari sebagai simbol kehidupan; (f) penetapan hari Ahad sebagai hari ibadah yang resmi; dan (g) perubahan ucapan salam, dengan mengganti "*Assalamualaikum*" menjadi "*Allahu Akbar*" dan "*Alaikum salam*" menjadi "*jalla jalalah*" (Thahir, 2004: 206).

Din Ilahiy, atau "*Agama Ilahi*," adalah sebuah sistem kepercayaan yang dikembangkan oleh Kaisar Mughal Akbar pada abad ke-16 di India. Ajaran ini berupaya untuk menciptakan harmoni antar agama dengan menggabungkan elemen-elemen dari agama Hindu, Islam, Zoroastrianisme, dan agama-agama lain yang ada di India pada waktu itu. Meskipun *Din Ilahiy* tidak bertahan lama setelah kematian Akbar, ajaran ini mencerminkan upaya Akbar untuk merangkul berbagai tradisi spiritual dalam pemerintahannya, yang lebih mengutamakan ke-Esaan Tuhan dan toleransi antar umat beragama.

Sultan Akbar dikenal sebagai penguasa yang sangat progresif dalam hal toleransi agama. Salah satu alasan pembentukan "Din Ilahy" adalah untuk mengurangi ketegangan antar agama yang ada pada masa itu. Di India, perbedaan agama antara umat Hindu dan Muslim sering memicu konflik dan kekerasan. Akbar berupaya untuk menyatukan beragam tradisi ini melalui pembentukan sistem kepercayaan baru yang lebih inklusif.

Beberapa faktor yang mendorong Sultan Akbar untuk menciptakan "Din Ilahy" meliputi: 1) Ketidaksesuaian di antara para ulama dan pemimpin agama terkait masalah-masalah keagamaan, yang mengarah pada perpecahan dan saling serang; 2) Meningkatnya fanatisme di kalangan masyarakat dan pengikut berbagai agama di India, yang dipicu oleh para pemuka agama dan menyebabkan banyak perselisihan antar kelompok; 3) Pengaruh penasihat agama dan politik Akbar, seperti Abu Fadhl, Mir Abdul Latif (dari Persia), dan Syaikh Mubaraq, yang membiarkan, bahkan mendorong Akbar untuk berpikir lebih bebas dan radikal dalam hal keagamaan (Thahir, 2004: 207).

Bidang Seni dan Budaya

Warisan seni arsitektur yang monumental dari Dinasti Mughal hingga kini tetap menjadi salah satu pencapaian paling menonjol. Pada masa Akbar, dibangun Istana Fatpur Sikri di Sikri, dilengkapi dengan villa dan masjid-masjid yang megah. Sementara itu, pada era Syah Jehan, sejumlah mahakarya arsitektur seperti Masjid Mutiara dan Taj Mahal di Agra, Masjid Raya Delhi, serta istana megah di Lahore berhasil diwujudkan (Setiawan et al., 2024).

Pada era Syah Jehan, Dinasti Mughal mencapai puncak kejayaan dalam seni arsitektur dengan pembangunan beberapa bangunan ikonik seperti Taj Mahal di Agra, Masjid Raya di Delhi, Masjid Mutiara, dan istana megah di Lahore, yang semuanya menunjukkan detail artistik tinggi serta harmoni simetri. Pada masa pemerintahan Aurangzeb, meskipun kebijakan politiknya lebih konservatif, seni budaya tetap mengalami perkembangan. Seni lukis mulai mendapatkan perhatian, diiringi kemajuan dalam bidang karya sastra seperti syair dan penulisan sejarah, yang mencerminkan kehidupan sosial dan budaya masa itu. Perkembangan ini mempertegas peran Dinasti Mughal sebagai pelopor dalam seni dan kebudayaan di wilayah Asia Selatan (Yatim, 2002: 150–151). Keseluruhan warisan seni dan arsitektur ini tidak hanya menjadi simbol kekuatan politik, tetapi juga mencerminkan harmoni budaya serta keberagaman yang menjadi ciri khas pemerintahan Mughal. (Yatim, 2016: 150–151).

Bidang Agama

Masuknya Islam ke India memang tidak terlepas dari konflik kepercayaan, terutama karena wilayah tersebut telah menjadi pusat perkembangan agama Hindu yang kuat. Ketegangan ini wajar terjadi karena adanya perbedaan mendasar dalam doktrin dan praktik keagamaan antara Islam dan Hindu. Para penguasa Islam berusaha menciptakan keadilan dalam menjalankan ibadah, tetapi kerap diwarnai oleh kecurigaan dan kesalahpahaman politik. Salah satu upaya akomodasi dilakukan oleh Sultan Akbar melalui ajaran baru Din-i-Ilahi pada tahun 1582 M, yang bertujuan untuk

mengintegrasikan nilai-nilai universal dari berbagai agama, tetapi ajaran ini tidak mendapat respons positif dari ulama Islam karena dianggap menyimpang dari prinsip-prinsip syariat (Yatim, 2016). Akbar juga memperistri seorang wanita Hindu untuk meredakan ketegangan antara pemeluk dua agama besar tersebut (Hasymi, 1993: 180).

Selain itu, sistem kasta dalam agama Hindu yang bersifat hierarkis justru memberikan peluang bagi Islam untuk berkembang karena Islam menawarkan prinsip kesetaraan dalam ajarannya. Kondisi ini mendorong munculnya aliran-aliran Islam di India, termasuk Syiah. Pada masa pemerintahan Aurangzeb, risalah hukum Islam yang terkompilasi dalam *Fatawa-e-Alamgiri* disusun untuk memperkuat penerapan syariat Islam di wilayah kekuasaannya (Thohir, 2004: 210). Meski demikian, pertentangan antara Islam dan Hindu juga menjadi pendorong munculnya agama baru, seperti Sikhisme pada abad ke-15, yang merupakan sinkretisme antara Islam dan Hindu. Sikhisme yang dipimpin oleh Guru Nanak (1469–1539 M) berkembang pesat dan menjadi salah satu agama besar di India. Kepemimpinan Guru Nanak diteruskan oleh guru-guru berikutnya hingga Guru Govind Singh (1675–1708 M), yang memperkuat komunitas Sikh dalam menghadapi tantangan dari umat Islam maupun Hindu (Ali, 2005: 98).

Lambat laun, penganut Sikh membentuk komunitas yang terorganisasi dengan baik dan akhirnya berhasil menciptakan kekuatan politik dan sosial baru di Asia Selatan. Keberadaan Sikhisme menjadi salah satu bukti kompleksitas interaksi agama-agama besar di India dan dinamika yang berlangsung selama masa Dinasti Mughal (Mahmud, 1994: 135).

Bidang Pengetahuan

Pada periode ini, berkembang banyak mausu'at dan mu'jamat, yaitu karya tulis berupa kumpulan berbagai ilmu dan topik yang menyerupai ensiklopedia modern. Perkembangan tersebut menunjukkan meningkatnya perhatian terhadap ilmu pengetahuan yang sistematis dan terdokumentasi dengan baik, sehingga zaman ini sering disebut sebagai zaman mausu'at. Pada masa ini, muncul pula pemikir-pemikir baru yang berkontribusi dalam mengembangkan ijtihad, meskipun terbatas pada ruang lingkup mazhab yang telah mapan. Mereka lebih fokus pada penafsiran ulang serta elaborasi ajaran mazhab yang ada daripada menciptakan pemikiran yang sepenuhnya baru (Hasyim, 1975: 308).

Dalam bidang kebahasaan, Akbar menetapkan tiga bahasa utama sebagai bagian dari identitas nasional. Bahasa Arab digunakan dalam ranah keagamaan, bahasa Turki digunakan oleh kalangan bangsawan, dan bahasa Persia menjadi bahasa resmi istana sekaligus kesusastraan. Namun, setelah satu setengah abad mencapai masa kejayaan, Dinasti Mughal mulai mengalami kemunduran pada masa penerus Aurangzeb yang tidak mampu mempertahankan keunggulan yang telah dibangun oleh para pendahulunya. Pada abad ke-18 M, kekuatan politik kerajaan ini mulai melemah, suksesi kepemimpinan di tingkat pusat diwarnai konflik, dan ancaman dari gerakan separatis, seperti Hindu di India Tengah, Sikh di wilayah utara, serta kelompok Islam di bagian timur, semakin meningkat (Yamani & Santalia, 2022).

Fase Stagnasi: Awal Melemahnya Asabiyyah

Setelah mencapai masa kejayaannya, Dinasti Mughal mulai memasuki fase stagnasi yang ditandai oleh melemahnya asabiyyah atau solidaritas sosial internal. Pada masa pemerintahan Shah Jahan, perhatian dinasti banyak diarahkan pada proyek-proyek besar dan mewah seperti pembangunan Taj Mahal dan istana-istana megah, yang meskipun menjadi simbol kebesaran, justru menguras sumber daya negara secara signifikan. Gaya hidup mewah dan boros di kalangan elit pemerintahan semakin memperburuk kondisi dengan menurunkan semangat kolektif yang sebelumnya menjadi fondasi kekuatan dinasti.

Ketegangan sosial semakin meningkat pada masa pemerintahan Aurangzeb (1658–1707) akibat kebijakan intoleransi agama yang diterapkannya. Pengenaan pajak tambahan terhadap umat Hindu melalui jizya dan tindakan penghancuran tempat ibadah non-Muslim memicu ketidakpuasan di kalangan rakyat. Kebijakan ini tidak hanya memperlemah dukungan internal tetapi juga menimbulkan perlawanan dari berbagai kelompok, termasuk masyarakat Hindu dan penganut agama lainnya.

Menurut teori Ibnu Khaldun, stagnasi dalam suatu peradaban terjadi ketika para pemimpin kehilangan koneksi dengan rakyatnya, dan asabiyyah yang menjadi kekuatan pendorong dalam membangun dinasti mulai melemah. (Khaldun, 2006). Fenomena ini terlihat jelas pada masa Dinasti Mughal, di mana jurang antara pemimpin dan rakyat semakin melebar, sehingga mempercepat proses disintegrasi sosial dan politik (Thohir, 2004).

Fase Kemunduran: Masa Kemunduran dan Kehancuran Dinasti Mughal

Kehadiran bangsa-bangsa Barat di India, terutama Inggris, semakin memperumit situasi politik dan sosial yang dihadapi oleh Dinasti Mughal. Inggris berhasil memanfaatkan Selat Benggala untuk memasuki wilayah timur India, yang diawali dengan kemenangan mereka dalam Perang Buxar tahun 1764. Dalam perang ini, Gubernur Benggala berhasil ditundukkan oleh Inggris, membuka jalan bagi ekspansi kolonial mereka ke seluruh pelosok India. Walaupun Dinasti Mughal secara formal masih bertahan hingga 1857, peran mereka semakin terpinggirkan, terutama setelah Sultan Bahadur Shah dijadikan simbol perlawanan rakyat India terhadap Inggris dalam peristiwa "Pemberontakan Sepoy" atau dikenal juga sebagai "The First War of Indian Independence" (Jamaludin, 2009: 224).

Keruntuhan Dinasti Mughal tidak hanya disebabkan oleh faktor eksternal, tetapi juga internal. Secara internal, ketidakjelasan dalam proses suksesi sering kali memicu perebutan kekuasaan dan perang saudara, melemahkan stabilitas dinasti. Selain itu, lemahnya pengawasan terhadap pemerintahan daerah mempercepat proses disintegrasi. Di sisi eksternal, Dinasti Mughal menghadapi pemberontakan dari berbagai kelompok, termasuk umat Hindu dan Sikh, serta serangan dari Raja Ahmad Khan dari Afghanistan. Kebijakan pajak yang memberatkan rakyat dan gaya hidup boros para elit kerajaan semakin memperburuk kondisi ini.

Kemerosotan moral di kalangan elit politik, yang disertai dengan gaya hidup mewah, menyebabkan pemborosan anggaran negara. Selain itu, kebijakan Aurangzeb yang dianggap terlalu ekstrem dalam menerapkan ide-ide puritan serta kecenderungan hidup asketisnya memperburuk konflik antaragama, yang sebelumnya telah menjadi persoalan sejak masa pemerintahan sultan-sultan sebelumnya. Pada paruh akhir Dinasti Mughal, kelemahan dalam kemampuan kepemimpinan menjadi ciri khas para penerus takhta (Basri et al., 2023).

Momentum kehancuran dinasti mencapai puncaknya ketika Kerajaan Britania berhasil menguasai India melalui kemenangan dalam Pertempuran Plassey pada tahun 1757, yang menandai awal dominasi Inggris di anak benua India (Ali, 2005: 156). Penetrasi kolonial ini menjadi salah satu faktor utama yang mengakhiri pemerintahan Mughal dan menggantinya dengan sistem kekuasaan kolonial yang berlangsung hingga abad ke-20.

Faktor Internal: Tidak Adanya Kejelasan Lajur Suksesi

Ketidakjelasan proses suksesi di lingkungan Dinasti Mughal sering menjadi akar konflik yang memicu pertumpahan darah dan melemahkan stabilitas politik kerajaan. Perselisihan ini biasanya melibatkan anggota keluarga kerajaan yang merasa berhak atas tahta, sehingga perebutan kekuasaan sering kali diwarnai kekerasan dan perang saudara (Mu'nis, 1973: 486). Salah satu contoh yang menonjol adalah perebutan kekuasaan antara Aurangzeb dan saudara-saudaranya Murad, Syuja', dan Syikoh yang akhirnya dimenangkan oleh Aurangzeb melalui serangkaian pertempuran berdarah (Mahmudunnasir, 1994: 368-369).

Setelah kematian Aurangzeb, persaingan suksesi terus berlanjut di antara anak-anaknya. Bahadur Syah berhasil naik tahta berkat aliansinya dengan bangsa Rajput, yang sebelumnya merupakan musuh besar Mughal (Israr, 1978: 108). Namun, setelah Bahadur Syah meninggal, konflik kembali mencuat ketika Azimuz Syah, penggantinya, menghadapi penentangan dari Zulkiflar Khan, anak Azad Khan yang pernah menjadi Wazir pada masa Aurangzeb. Kekacauan ini terus berlanjut, hingga akhirnya Jihandar Syah menggantikan Azimuz Syah. Akan tetapi, Jihandar Syah pun ditantang oleh adiknya, Farukh Syah, yang berhasil merebut tahta pada 1713 M. (Yatim, 2016)

Kekuasaan Farukh Syah hanya berlangsung singkat, karena ia akhirnya dibunuh oleh para pendukungnya sendiri pada 1719. Setelah itu, Muhammad Syah naik tahta dan memimpin hingga 1748 M. Namun, kekuasaan Muhammad Syah juga terganggu oleh serangan Nadir Syah dari suku Afsyar, yang sebelumnya telah mengalahkan Dinasti Safawiyah di Persia. Penaklukan oleh Nadir Syah menjadi salah satu faktor penting yang mempercepat disintegrasi Dinasti Mughal, mengingat lemahnya struktur internal kerajaan dalam menghadapi ancaman eksternal (Thohir, 2004: 215).

Perang dan konflik internal yang berlangsung lama dalam Dinasti Mughal menyebabkan lemahnya pengawasan terhadap pemerintah daerah, yang berujung pada disintegrasi kerajaan. Ketidakstabilan ini juga merusak persatuan dan kesatuan yang sebelumnya menjadi kekuatan utama kerajaan. Beberapa wilayah mulai mengurangi

loyalitas mereka terhadap pemerintah pusat, bahkan memperkuat posisi mereka masing-masing untuk memperoleh kemerdekaan *de facto*. Di wilayah selatan, Hyderabad di bawah Nizam al Mulk serta Marathas yang dipimpin oleh Shivaji mulai menunjukkan kekuatan mereka. Di wilayah utara, Rajput yang dipimpin oleh Jai Singh dan kelompok Sikh di Punjab memperluas pengaruh mereka. Selain itu, wilayah Oudh dipimpin oleh Sadat Khan, Bengal berada di bawah kendali Syuja' al Din, dan wilayah pantai yang sebelumnya dikuasai oleh Mughal juga mulai jatuh ke tangan pedagang asing, terutama East India Company (EIC) dari Inggris. Semua ini semakin menandakan kemunduran Dinasti Mughal, yang tidak lagi mampu mempertahankan kontrol atas wilayah-wilayah kekuasaannya (Yatim, 2016).

Penyebaran kekuatan regional ini menciptakan kondisi yang lebih terfragmentasi di India, di mana kerajaan-kerajaan kecil atau penguasa lokal lebih berfokus pada kepentingan mereka sendiri daripada mempertahankan kesatuan di bawah satu pemerintahan pusat. Keadaan ini semakin menguntungkan Inggris, yang menggunakan ketegangan internal untuk memperluas pengaruh dan kontrol mereka melalui politik adu domba dan penguatan dominasi kolonial. (Ali, 2005: 158).

Lemahnya Para Pewaris Tahta Kerajaan

Setelah masa pemerintahan Aurangzeb, banyak pewaris tahta kerajaan Mughal yang menunjukkan kelemahan dalam kepemimpinan, yang semakin memperburuk kondisi politik kerajaan. Dari 29 Sultan yang pernah memimpin, hanya beberapa yang mampu bertahan lebih dari 20 tahun. Sebagian besar lainnya hanya memerintah dalam waktu yang sangat singkat, bahkan ada yang hanya bertahan beberapa bulan sebelum digantikan atau digulingkan (Bosworth, 1993: 235).

Perebutan tahta yang sering terjadi, ditambah dengan lemahnya kontrol pemerintah pusat terhadap wilayah-wilayah yang semakin mandiri, menyebabkan penurunan kualitas kepemimpinan yang vital bagi keberlangsungan kerajaan. Akibatnya, kerajaan Mughal semakin terpecah belah, dan dalam beberapa dekade setelah kematian Aurangzeb, kerajaan ini tidak lagi memiliki pemimpin yang kuat dan mampu menjaga stabilitas seperti sebelumnya.

Meskipun beberapa penguasa memerintah dalam waktu yang lama, tidak semuanya menikmati masa kejayaan. Beberapa di antaranya memimpin pada masa yang penuh kesulitan, seperti Nashir al Din Muhammad Syah yang sejak 1739 M menjadi kerajaan boneka setelah penaklukan oleh Nadir Syah dari Persia. Begitu pula dengan Jalal al-Din Alamgir II, yang meskipun tetap diizinkan memakai gelar Sultan, sebenarnya berada di bawah kekuasaan Ahmad Khan Durrani dari Afghanistan. Pada masa pemerintahan Sultan Akbar II, meskipun gelar Sultan tetap dipertahankan, kekuasaan nyata berada di tangan perusahaan dagang Inggris (IEC), yang diberikan konsesi untuk berkembang di India, dengan jaminan kehidupan bagi raja dan keluarga istana (Yatim, 2016).

Pola Kehidupan Mewah dan Boros

Gaya hidup mewah dan pemborosan yang diterapkan oleh penguasa Dinasti Mughal menambah beban besar pada anggaran negara, yang pada akhirnya menyebabkan peningkatan pajak. Hal ini berdampak pada kehidupan petani di pedesaan maupun masyarakat kota (Mu'nis, 1973: 85). Sebagai contoh, Sultan Akbar mengalokasikan sebagian besar kekayaan negara untuk membangun masjid dan istana yang megah, seperti Fadifur (Fathpur) Sikri yang didirikan pada tahun 1560 M.

Demikian pula dengan Syah Jehan, yang menghabiskan sebagian besar kekayaan negara untuk membangun berbagai proyek mewah, seperti masjid, istana, dan singgasana yang terbuat dari emas dan permata langka (Israr, 1978: 107). Selama pemerintahannya, Syah Jehan juga memerintahkan pembangunan Taj Mahal di Agra pada tahun 1613 M, sebagai bentuk simbol cintanya kepada permaisuri Mumtaz Mahal. Taj Mahal, yang terbuat dari marmer putih, memiliki ukuran yang sangat besar dan desain yang terinspirasi oleh gaya arsitektur Persia, dilengkapi dengan kubah setinggi 80 meter. Pembangunan proyek ini melibatkan para arsitek dari Italia, Persia, dan negara lain serta sekitar 20.000 pekerja, yang memerlukan waktu 17 tahun untuk diselesaikan. Makam permaisuri Mumtaz Mahal berada di dalam kompleks ini, dan makam Syah Jehan kemudian diletakkan di sampingnya, dikelilingi oleh permata-permata berharga (Israr, 1978: 114-115).

Meskipun Taj Mahal diakui sebagai salah satu karya seni luar biasa dan termasuk dalam daftar keajaiban dunia, kemewahan yang ditunjukkan dalam proyek ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan rakyat. Rakyat merasa terbebani oleh kenaikan pajak yang terpaksa mereka tanggung, sebagai akibat dari pemborosan negara yang terjadi selama masa pemerintahan Syah Jehan. Pembangunan Taj Mahal sendiri mencerminkan dinamika politik dan sosial pada masa itu, di mana meskipun mencapai prestasi seni yang luar biasa, hal ini juga menunjukkan ketimpangan antara kekayaan kerajaan dan penderitaan ekonomi yang dialami oleh rakyat.

Kebijakan Puritanisme

Kebijakan puritanisme yang diterapkan oleh Sultan Aurangzeb, yang berupaya memaksa masyarakat Hindu untuk memeluk Islam dan mengubah India menjadi negara Islam, serta menyerang praktik sosial dan keagamaan Hindu (Hodgson, 1974: 96), disertai dengan diskriminasi terhadap umat Hindu dan pemberian hak istimewa kepada umat Islam (Bosworth, 1993: 237), menyebabkan ketegangan yang mendalam di kalangan masyarakat Hindu. Hal ini memicu kemarahan mereka terhadap kebijakan Mughal, yang akhirnya mendorong mereka untuk memusuhi kerajaan dan menjalin aliansi dengan musuh-musuhnya. Sebagai akibatnya, sejumlah pemberontakan meletus, termasuk yang dipimpin oleh Marathas di bawah komando Santaji Ghjorpade dan Dhanaji Jadev (Mahmudunnasir, 1994: 373).

Pemaksaan Ajaran Syi'ah

Pemaksaan ajaran Syi'ah oleh Muazzam, putra tertua Sultan Aurangzeb, setelah ia menjadi penguasa Kabul dengan gelar Bahadur Syah (1707-1712 M), bertentangan dengan kebijakan yang diterapkan oleh penguasa Mughal sebelumnya, seperti Syah Jehan, yang lebih menekankan pada penyatuan Asia Tengah dan India dalam kerangka kekaisaran Sunni (Bosworth, 1993: 273). Kebijakan ini memicu perlawanan dari berbagai kelompok, termasuk penduduk Lahore dan kaum Syekh, yang merasa terancam oleh perubahan arah kebijakan agama yang dipaksakan oleh Sultan sebelumnya (Yatim, 2016).

Pergeseran kebijakan agama ini menciptakan ketegangan dalam kerajaan, yang semakin memperburuk kondisi politik dan sosial yang sudah tidak stabil. Ketika Mughal mulai membebani dirinya dengan kebijakan-kebijakan yang lebih kontroversial seperti ini, mereka tidak hanya kehilangan dukungan dari sebagian besar penduduk Hindu dan Muslim, tetapi juga menghadapi perlawanan dari kelompok yang sebelumnya lebih mendukung pemerintahan Mughal. Konflik internal ini, ditambah dengan tantangan eksternal, mempercepat proses disintegrasi yang mengarah pada kemunduran Kerajaan Mughal.

Kemunduran Kerajaan Mughal dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal yang signifikan. Pertama, pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok Hindu dan Sikh, yang dipicu oleh kebijakan politik dan ekonomi yang diterapkan oleh penguasa Mughal, termasuk puritanisme dan beban pajak yang tinggi untuk mendukung gaya hidup mewah dan boros. Selain itu, peristiwa sejarah seperti penaklukan kota Khithor oleh Sultan Akbar pada 1556-1605 M, yang menyebabkan kehancuran total dan bunuh diri massal oleh 30.000 penduduk, turut memperburuk ketegangan antara Mughal dan masyarakat lokal (Israr, 1978: 105).

Kedua, serangan dari luar juga berperan besar dalam melemahkan kerajaan. Nadir Bahadur Syah akhirnya ditangkap dan diasingkan ke Burma, di mana ia meninggal dan dimakamkan di dekat sebuah masjid di Rangoon (Israr, 1978: 108). Penangkapannya menandai berakhirnya sejarah kekuasaan Mughal setelah lebih dari tiga abad berdiri kokoh di India, meninggalkan warisan budaya yang kaya, terutama di bidang seni. Syah dari Persia, pada tahun 1739 M, menyerang Mughal, dengan alasan kerajaan Mughal memberikan dukungan kepada pemberontak Afghan di Persia. Selain itu, serangan Ahmad Khan Durrani dari Afghanistan pada tahun 1761 M semakin memperburuk keadaan, meskipun Syah Alam masih diizinkan mempertahankan gelar Sultan, yang mencerminkan keterbatasan kekuasaan Mughal (Bosworth, 1993: 238).

Ketiga, kedatangan kekuatan Inggris melalui perusahaan dagang mereka, East India Company (IEC), mempercepat kemunduran Mughal. Pada periode pertama, pada 1671 M, ketika kerajaan Mughal berada dalam kondisi lemah setelah serangan Ahmad Khan Durrani, Inggris berhasil memperoleh kendali atas wilayah-wilayah penting seperti Qudh, Bengal, dan Orisa melalui perjanjian damai. Periode kedua terjadi pada 1857 M, ketika pemberontakan besar terjadi di bawah kepemimpinan Bahadur Syah, yang menjadi simbol perlawanan rakyat terhadap kebijakan pajak yang tinggi. Namun, pemberontakan

ini dengan cepat dipadamkan oleh Inggris, yang mendapatkan dukungan dari beberapa penguasa lokal Hindu dan Muslim. (Bosworth, 1993: 238).

Bahadur Syah akhirnya ditangkap dan diasingkan ke Burma, di mana ia meninggal dan dimakamkan di dekat sebuah masjid di Rangoon (Israr, 1978: 108). Penangkapannya menandai berakhirnya sejarah kekuasaan Mughal setelah lebih dari tiga abad berdiri kokoh di India, meninggalkan warisan budaya yang kaya, terutama di bidang seni.

KESIMPULAN

Dinasti Mughal mencerminkan siklus peradaban Ibnu Khaldun yang meliputi kelahiran, kejayaan, stagnasi, dan kemunduran. Keberhasilan awal dinasti ini didorong oleh asabiyyah yang kuat dan kepemimpinan visioner, sementara kemundurannya disebabkan oleh fragmentasi internal, gaya hidup boros, kebijakan intoleransi, dan dominasi kolonial. Studi ini menunjukkan relevansi teori Ibnu Khaldun dalam menganalisis pola sejarah peradaban besar, dengan implikasi penting bagi pemahaman dinamika sosial-politik masa kini.

Dinasti Mughal, yang didirikan pada tahun 1526 oleh Zahiruddin Muhammad Babur, mencapai kejayaannya melalui kemajuan dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan militer. Keberhasilan mereka dalam mengakomodasi perbedaan budaya dan agama, serta mengembangkan seni, ekonomi, dan arsitektur, menjadi faktor utama kejayaan kerajaan ini. Namun, kemunduran dan kehancurannya disebabkan oleh berbagai faktor internal, seperti kebijakan intoleransi, ketidakjelasan suksesi, dan lemahnya kepemimpinan, serta faktor eksternal, termasuk dominasi kolonial dan pemberontakan oleh kelompok Hindu dan Sikh. Meskipun demikian, Dinasti Mughal memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan peradaban Islam di India dan meninggalkan warisan seni dan budaya yang tetap dihargai hingga saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, A., Yunus, A. R., & Syukur, S. (2022). Sejarah Perkembangan dan Kemunduran Tiga Kerajaan Islam di Abad Modern (1700-1800-an). 8(1), 35–47.
- Ahmed, A. S. (2003). *Rekonstruksi Sejarah Islam: Di Tengah Pluralitas Agama dan Peradaban* (A. Nst, trans.). Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru.
- Aniroh, A. (2021). Pendidikan Islam Masa Pertengahan (Studi Historis Pendidikan Di Kerajaan Usmani, Kerajaan Safawi Dan Kerajaan Mughal). *AT-THARIQ: Jurnal Studi Islam dan Budaya*, 1 (2).
- Ali, M. N. (2022). Kebijakan Politik Pemerintahan Shah Jahan di Kesultanan Mughal. *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial*, 6(2), 437-443.
- Ali, M. (2005). *Islam di Asia Selatan: Sejarah dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Arnold, T. W. (1995). *Sejarah Da'wah Islam* (H. A. Nawawi Rambe, trans.). Jakarta: Wijaya Jakarta.
- Basri, M., Tasya, M. F. A., & Mawaddah, N. (2023). Kemunduran Dan Kehancuran Kerajaan Mughal. 1(2).

- Bosworth, C. E. (1993). *The New Islamic Dynasties: A Chronological and Genealogical Manual*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Erwin, T. N. (1990). *Asia Selatan dalam Sejarah*. Jakarta: Lembaga Penerbit Universitas Indonesia.
- Fitrah, A., Sarimah, N., Febriani, E., Dinda, D., Koryati, K., Fitriani, N., & Noviani, D. (2024). Sejarah Perkembangan Dinasti Mughal dan Penguasa Muslim di Tanah India Tahun 1525-1857. *Mutiara : Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah*.
- Hamka. (1975). *Sejarah Ummat Islam III*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hasyim, A. (1975). *Sejarah Kebudayaan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hodgson, M. G. S. (1974). *The Venture of Islam* (Vol. III). Chicago: The University of Chicago Press.
- Irwan Suhandi (Ed.). (2007). *India Bangkitnya Raksasa Baru Asia, Calon Pemain Utama Dunia di Era Globalisasi*. Jakarta: Kompas.
- Israr, C. (1978). *Sejarah Kesenian Islam* (Vol. 2). Jakarta: Bulan Bintang.
- Jamalludin, A. (2009). *Sejarah Peradaban Islam: Dari Masa Klasik hingga Modern*. Bandung: Pustaka Setia.
- Karim, M. A. (2003). *Sejarah Islam di India*. Yogyakarta: Bunga Grafies Production.
- Khaldun, I. (2006). *Muqaddimah* (trans.). Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Lapidus, M. I. A. (2003). *History of Islamic Societies* (G. A. Mas'adi, trans.). *Sejarah Sosial Umat Islam* (3rd ed.). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Lubis, D. E., Muhajir, A., Dahlan, Z. (2021). Peradaban dan Pemikiran Islam Pada Masa Dinasti Mughal di India. *Islamic Education*.
- Mahmud, S. (1994). *Islam dan Hindu di Anak Benua India*. Bandung: Mizan.
- Mahmudunnasir, S. (1994). *Islam Konsepsi dan Sejarahnya* (A. Affandi, trans.). Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mirri, M. J. (2009). Kemunduran dan Kehancuran Dinasti Mughal. *el-Harakah*, 11(3).
- Mu'nis, H. (1973). *Sejarah Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Mu'nis, H. (1973). *'Alam al Islami*. Mesir: Dar al Ma'arif.
- Pertiwi, P.D., & Setiawati, E. (2022). TINJAUAN HISTORIS PEMERINTAHAN DINASTI MUGHAL PADA MASA PEMERINTAHAN SULTAN AKBAR TAHUN 1556-1605 M. *SWARNADWIPA*
- Rahman, A. (2014). *Kejayaan Mughal di India: Sebuah Tinjauan Sejarah*. Jakarta: Pustaka Dunia.
- Supardi. (2008). Perkembangan dan Peninggalan Dinasti Moghul di India 1525-1857. *ISTORIA*, 5(2).
- Su'ud, A. (1988). *Memahami Sejarah Bangsa-bangsa Asia Selatan Sejak Jaman Purba sampai Kedatangan Islam*. Jakarta: Depdikbud PPLPTK.
- Suwarno, I. (2011). *Sejarah Islam di Asia Selatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Thohir, A. (2004). *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yamani, S., & Santali, I. (2022). Sejarah Perkembangan Dan Kemunduran Tiga Kerajaan Islam Abad Modern Tahun 1700-1800. 6 (2)
- Yatim, B. (2016). *Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyah II* (Ed. 1., Cet. 27). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Mulia, T. S. G. (1959). *Sejarah Politik dan Pergerakan Kebangsaan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Zalukhu, D.M. (2024). Dinasti Mughal Dan Kemunduran Islam Di India Tahun 1525-1857 M. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*.
- Zubaidah, S. (2016). *Sejarah Peradaban Islam*. Medan: Perdana Publishing.

Zulkarnain, H. (2013). *Pengaruh Seni dan Arsitektur Islam di India pada Masa Mughal*. Bandung: Mizan Pustaka.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)